

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab II ini membahas informasi yang berkaitan dengan lokus penelitian yang dimana berisikan tentang gambaran umum Provinsi DKI Jakarta serta badan perusahaan yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta).

#### **2.1 Profil Provinsi DKI Jakarta**

DKI Jakarta ialah ibukota Indonesia yang terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Sebelumnya Jakarta dikenal dengan berbagai nama, pada tahun 1527 dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa. Sebutan Jayakarta dikenal setelah tahun 1527 sampai tahun 1619 Jakarta, kemudian Jakarta berubah nama menjadi Batavia tahun 1619 sampai tahun 1942. Terakhir, pada tahun 1942 sampai tahun 1972 Djakarta adalah sebutan untuk Kota Jakarta.

Pada dasarnya DKI Jakarta menjadi kota dengan beberapa fungsi, yaitu sebagai ibukota NKRI, daerah otonom, serta pusat pemerintahan. Fungsi itu membuat DKI Jakarta memiliki masalah yang kompleks serta berbeda dengan provinsi lainnya. Permasalahannya berkaitan urbanisasi, keamanan, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, transportasi, serta masalah sosial yang perlu adanya pemecahan masalah secara sinergis.

### **2.1.1 Visi dan Misi**

Pada RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 telah dicantumkan visi DKI Jakarta, yakni **Jakarta Kota Maju, Lestari, dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan, dan Kesejahteraan Bagi Semua.**

Perwujudan visi tersebut dilakukan dengan menjalankan beberapa misi, yaitu:

1. Menjadikan Jakarta kota yang berbudaya, cerdas, aman, sehat dengan memperkuat nilai keluarga serta memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang memanusiakan, melibatkan, dan menggerakkan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya keterjangkauan kebutuhan pokok, kestabilan, lapangan kerja, perbaikan pengelolaan tataruang, kemudahan investasi dan berbisnis, percepatan pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya keadilan sosial.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang melayani, berkarya, mengabdikan serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara berintegritas, efektif, dan meritokratis.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan tata kehidupan dan pembangunan yang memperkuat daya dukung sosial dan lingkungan.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan kebhinekaan, keadilan, dan kebangsaan.

### **2.1.2 Kondisi Geografis**

Wilayah DKI Jakarta terletak antara 5°19'12'' LS - 6°23'54'' LS dan 106°22'42'' BT - 106°58'18'' BT dengan ketinggian rata-rata ±7m diatas

permukaan laut. Luas wilayahnya 7.639,83 km<sup>2</sup> (662,33 km<sup>2</sup> luas daratan dan 6.977,5 km<sup>2</sup> luas lautan). Batas wilayah DKI Jakarta, yaitu membentang pantai dari Barat sampai Timur sepanjang ±35 km yang menjadi muara dari 9 sungai dan 2 kanal serta disebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, disebelah selatan dan timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, serta disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten.

**Gambar 2.1**

Peta Wilayah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: [jakarta.bpk.go.id/peta-wilayah-jakarta/](http://jakarta.bpk.go.id/peta-wilayah-jakarta/)

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa DKI Jakarta secara administrasi terbagi kedalam lima wilayah kota administratif dan satu kabupaten administratif dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih efisien dan efektif. Pembagian wilayah DKI Jakarta bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta**

No	Kota/Kabupaten	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.572
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	454	5.223
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	585	6.481
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.088
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	708	7.926
6	Kepulauan Seribu	8,7	2	6	24	127
<b>Jumlah</b>		<b>662,33</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>2.739</b>	<b>30.417</b>

*Sumber : RKPD Provinsi DKI Jakarta, 2021*

Tabel 2.1 menjelaskan tentang pembagian wilayah DKI Jakarta yang meliputi, Kota Administrasi Jakarta Pusat (luas 48,13 km<sup>2</sup>), Kota Administrasi Jakarta Utara (luas 146,66 km<sup>2</sup>), Kota Administrasi Jakarta Barat (luas 129,54 km<sup>2</sup>), Kota Administrasi Jakarta Selatan (luas 141,27 km<sup>2</sup>), Kota Administrasi Jakarta Timur (luas 188,03 km<sup>2</sup>), dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu (luas 8,7 km<sup>2</sup>). Kemudian dari beberapa wilayah tersebut terdiri atas 44 Kecamatan, 267 Kelurahan, 2.739 RW, dan 30.417 RT.

### **2.1.3 Kondisi Demografis**

Pertumbuhan suatu penduduk dipengaruhi oleh migrasi, kematian, bahkan kelahiran. Jumlah penduduk DKI Jakarta sangat beragam dan juga semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2020 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10.562.088 jiwa (5.334.781 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 5.227.307 jiwa berjenis kelamin perempuan). Berikut disajikan data mengenai jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2018-2020, yaitu:

**Tabel 2.2**

Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
		2018	2019	2020
1.	Kepulauan Seribu	24.134	24.295	27.749
2.	Jakarta Selatan	2.246.137	2.264.699	2.226.812
3.	Jakarta Timur	2.916.018	2.937.859	3.037.139
4.	Jakarta Pusat	924.686	928.109	1.056.896
5.	Jakarta Barat	2.559.362	2.589.933	2.434.511
6.	Jakarta Utara	1.797.292	1.812.915	1.778.981
<b>Total</b>		<b>10.467.629</b>	<b>10.557.810</b>	<b>10.562.088</b>

Sumber: BPS DKI Jakarta, diolah, 2021

Tabel 2.2 menjelaskan tentang jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2018-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya DKI Jakarta selalu mengalami pertumbuhan penduduk. Migrasi, kematian, bahkan kelahiran penduduk dapat menentukan bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk di DKI Jakarta. Jumlah penduduk paling banyak diduduki oleh Kota Jakarta Timur di tahun 2020, yaitu sebanyak 3.037.139 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk paling sedikit diduduki oleh Kabupaten Kepulauan Seribu di tahun 2018, yaitu sebanyak 24.134 jiwa.

DKI Jakarta merupakan pusat ibukota dan dikenal dengan kota yang padat penduduknya. Salah satunya karena banyak masyarakat berupaya meningkatkan taraf hidupnya dengan bekerja dan mencari pekerjaan di pusat ibukota. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun juga dapat diketahui dari rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu atau sering disebut laju pertumbuhan penduduk. Berikut disajikan data laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2018-2020, yaitu:

**Tabel 2.3**

Laju Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan (%)		
		2018	2019	2020
1.	Kepulauan Seribu	1,69	1,79	2,69
2.	Jakarta Selatan	1,06	1,18	0,75
3.	Jakarta Timur	0,98	1,09	1,17
4.	Jakarta Pusat	0,29	0,34	1,53
5.	Jakarta Barat	1,43	1,60	0,63
6.	Jakarta Utara	1,10	1,22	0,76
<b>DKI Jakarta</b>		<b>1,07</b>	<b>1,19</b>	<b>0,92</b>

*Sumber: BPS DKI Jakarta, diolah, 2021*

Tabel 2.3 menerangkan tentang laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2018-2020. Data tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta mengalami kenaikan dari 1,07% menjadi 1,19% di tahun 2019 dan mengalami penurunan dari 1,19% menjadi 0,92% di tahun 2020. Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi sebesar 2,69% ditahun 2020, sedangkan Kota Jakarta Pusat ditahun 2018 menjadi wilayah yang laju pertumbuhan penduduknya terendah sebesar 0,29%. Meskipun pertambahan penduduk DKI Jakarta meningkat setiap tahun, namun laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena migrasi keluar lebih besar dari migrasi masuk ke DKI Jakarta, sehingga angka migrasi neto menjadi minus.

#### **2.1.4 Kondisi DKI Jakarta Pada Masa Pandemi**

Virus COVID-19 ialah salah satu penyakit berupa virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan dengan ditandai gejala umum seperti batuk, demam, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Virus COVID-19 ini sudah menyebar

hampir keseluruhan negara, salah satunya Indonesia dan berdampak bagi masyarakat hingga bisa menyebabkan kematian. Wabah virus COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia bulan Maret tahun 2020 dan kota yang pertama kali terkonfirmasi COVID-19 adalah DKI Jakarta. Sejak itu, pemerintah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan upaya menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin meluas.

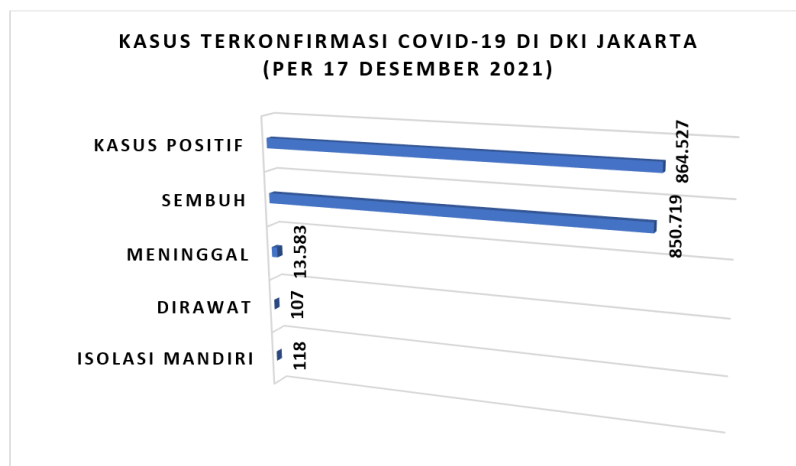
Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat yang dimana telah berganti nama beberapa kali dengan format ketentuan yang berbeda-beda. Kebijakan tersebut meliputi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro), PPKM Darurat, hingga PPKM empat level. Kebijakan tersebut secara garis besar memerintahkan masyarakat untuk membatasi kegiatannya di luar rumah (*work from home*), kemudian pemerintah juga melakukan penutupan atau pengurangan kapasitas pada pusat-pusat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan/rekreasi, sistem transportasi umum, maupun tempat ibadah.

Pada 6 November 2020, DKI Jakarta mulai memprioritaskan vaksinasi COVID-19 yang dimana terlebih dulu diberikan kepada para tenaga kesehatan dan selanjutnya diberikan kepada masyarakat dengan syarat dan kriteria yang sesuai. Vaksinasi dosis 1 saat ini mencapai 11.259.404 orang dengan perbandingan 68% warga KTP DKI Jakarta dan 32% warga KTP non-DKI Jakarta (Tobing & Maulana, 2021). Kemudian vaksinasi dosis 2 mencapai 9.197.397 orang dengan perbandingan 71% warga KTP DKI Jakarta dan 29% warga KTP non-DKI Jakarta (Tobing & Maulana, 2021).

Pemerintah terus mendorong masyarakat agar segera melakukan vaksinasi sebagai bentuk upaya dalam mengurangi penularan COVID-19. Kondisi pandemi di DKI Jakarta saat ini dapat dikatakan sudah lebih tenang, lebih terkendali, dan semakin melandai. Adapun data kasus terkonfirmasi COVID-19 di DKI Jakarta per 17 Desember 2021, sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

Kasus Terkonfirmasi COVID-19 di DKI Jakarta (per 17 Desember 2021)



Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>, 2021

Gambar 2.2 menjelaskan tentang kasus terkonfirmasi COVID-19 di DKI Jakarta saat ini (per 17 Desember 2021) yang dimana terdapat 38 kasus baru, 32 pasien sembuh, dan tidak ada penambahan kasus meninggal. Secara akumulatif kasus positif mencapai 864.527 kasus, sembuh mencapai 850.719 kasus, meninggal 13.583 kasus, serta kasus aktif (dirawat/isolasi) mencapai 225 kasus. Hal ini membuat DKI Jakarta masih menjadi daerah penyumbang kasus COVID-19 terbanyak urutan ke-3 se-Indonesia. Meskipun kondisi pandemi di DKI Jakarta dapat terbilang melandai, pemerintah tetap meminta masyarakat untuk mematuhi



protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

### **2.1.5 Sistem Transportasi di DKI Jakarta**

Salah satu kota megapolitan, yakni DKI Jakarta tentu mengalami permasalahan bidang transportasi yang bisa disebabkan aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi. Kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, ketersediaan serta pelayanan angkutan umum yang terbatas termasuk contoh masalah transportasi di DKI Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan kelancaran lalu lintas terganggu dan menimbulkan adanya kemacetan di beberapa titik ruas jalan.

Hal tersebut membuat pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, salah satunya dibidang transportasi. Pengembangan pelayanan transportasi yang terjangkau, dan terintegrasinya semua jenis moda transportasi umum merupakan fokus pembangunan transportasi di DKI Jakarta beberapa tahun kedepan. Pembatasan lalu lintas dan peningkatan kapasitas jaringan dilakukan untuk mendukung pengintegrasian antar moda transportasi umum di DKI Jakarta. Salah satu cara pemerintah terhadap pengembangan layanan transportasi yang terjangkau, yakni prinsip OK Otrip.

Mekanisme tersebut menggunakan sistem pembayaran elektronik melalui sebuah kartu yang *ditop up* sebelumnya melalui ATM atau gerai swalayan yang sudah bekerja sama. Prinsip ini terintegrasi dengan operator layanan angkutan perkotaan sehingga bisa mengidentifikasi jejak elektronik dari kartu yang

digunakan dengan memaksimalkan penarikan tarif sebesar Rp. 5.000. Selain itu, pemberlakuan waktu layanan yang dibatasi maksimal 3 jam dihari kerja untuk setiap perjalanan atau sesuai dengan peraturan Pemerintah DKI Jakarta sejak kartu pertama kali ditempelkan dimesin kartu elektronik yang terletak disetiap moda transportasi umum.

Dana kewajiban pelayanan publik perlu dialokasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta secara berkala kepada suatu layanan yang ditentukan. Kemudian pemerintah juga terus meningkatkan fasilitas pelayanan yang ramah diseluruh terminal dan stasiun di DKI Jakarta untuk penyandang difabel. Pemerintah berupaya untuk mendukung pembangunan transportasi di DKI Jakarta dengan cara melaksanakan diklat dan sertifikasi terhadap para pengemudi moda transportasi umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan para pengemudi yang harapannya bisa meningkatkan sikap, perilaku, serta keterampilan dalam melayani masyarakat. Selanjutnya pemerintah juga akan melakukan pengembangan terhadap angkutan-angkutan umum massal, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pembangunan MRT (*Mass Rapid Transit*) Jakarta**

Tahun 2014 jumlah penglaju Jabodetabek mencapai 3.566.178 orang. Pemerintah DKI Jakarta merancang pembangunan transportasi MRT (*Mass Rapid Transit*) yang bisa membawa penumpang sejumlah 173.400 penumpang perharinya. Hal tersebut karena semakin tingginya mobilitas serta timbulnya kemacetan di DKI Jakarta. Pembangunan MRT direncanakan pada dua jalur, yaitu Koridor *North-South* (24 km) yang terdiri dari fase pertama (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan fase kedua (Bundaran HI-Kampung Bandan) dan Koridor

*East-West* (87 km). Koridor *East-West* secara bertahap dibangun melewati Cikarang-Jakarta-Balaraja. Akan tetapi, usulan untuk koridor *East-West* fase pertama hanya didalam DKI Jakarta, yakni Kembangan-Cempaka Baru dan disambung Cempaka Baru-Ujung Menteng.

## **2. Pembangunan LRT (*Light Rail Transit*)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pembangunan LRT (*Light Rail Transit*) sebagai salah satu bagian dari proyek strategis nasional. Pembangunan ini sebagai perwujudan implementasi program pemerintah terkait pengembangan moda transportasi umum serta sebagai sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 di DKI Jakarta. Konsep pembangunan LRT ini dibangun pada tujuh koridor dengan total panjang keseluruhan mencapai 116 km dan setiap satu set LRT mampu membawa 540 penumpang atau kira-kira 12.000 sampai 18.000 penumpang perharinya. Pembangunan LRT terus dilakukan agar nantinya layanan operasional LRT bisa berintegrasi dengan transportasi umum lainnya dan juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta.

## **3. Pembangunan BRT (*Bus Rapid Transit*)**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk PT. Transportasi Jakarta untuk menyelenggarakan sistem BRT (*Bus Rapid Transit*) dalam rangka menyediakan serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna. Pembentukan PT. Transportasi Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4/2014 tentang Pembentukan

Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta. Dalam rangka pengembangan sistem pola transportasi makro di DKI Jakarta, pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/2014 tentang Pengelolaan Sistem BRT (*Bus Rapid Transit*). Peraturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk pengembangan integrasi transportasi umum dengan kualitas pelayanan yang baik serta tarif yang terjangkau.

## **2.2 Profil PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta)**

Transjakarta ialah sistem transportasi BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 208 km. Sistem transportasi BRT ini didisain dengan berdasarkan sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia. Transjakarta resmi beroperasi 1 Februari 2004. Keputusan Gubernur Nomor 110/2003 Transjakarta diputuskan berbentuk Badan Pengelola (BP) yang dimaksudkan untuk menjadikan Transjakarta sebagai *bus management company*. Badan Pengelola (BP) berkedudukan langsung dibawah Gubernur DKI Jakarta dan beroperasi dengan menggunakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada 4 Mei 2006, Badan Pengelola (BP) Transjakarta beralih jadi Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta.

Transjakarta menerapkan sistem manajemen armada terpadu pada tahun 2011 yang salah satunya menyediakan layanan *feeder busway* (bus pengumpan) bagi para penggunanya. Selanjutnya, tahun 2013 Transjakarta mulai menerapkan sistem *e-ticketing* untuk seluruh koridor dan berintegrasi dengan *feeder busway* (bus

pengumpulan) dan angkutan umum lainnya. Lalu, 27 Maret 2014, Transjakarta berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan resmi menjadi PT. Transportasi Jakarta yang dimana rencana pembukaan koridor baru serta inovasi diluncurkan untuk kenyamanan para pengguna. Secara khusus, 300 unit bus *low entry* yang memiliki keistimewaan dalam memudahkan pengguna untuk naik ke bus karena lantai bus yang rendah sehingga ramah terhadap difabel dibeli oleh Transjakarta.

### **2.2.1 Visi, Misi, dan Nilai PT. Transportasi Jakarta**

PT. Transportasi Jakarta memiliki visi, yaitu *Connecting the Life of Jakarta (Menghubungkan Kehidupan Jakarta)*.

Perwujudan visi tersebut, PT. Transportasi Jakarta juga memiliki misi, yaitu *Together we provide integrated transportation services to ease and bring happiness in their life of Jakarta (Bersama-sama menyediakan layanan transportasi terintegrasi yang memudahkan dan membahagiakan kehidupan Jakarta)*.

Selain visi misi tersebut, PT. Transportasi Jakarta juga menganut nilai-nilai yang sangat dihargai, diutamakan, dan dijunjung tinggi sebagai landasan prinsip berperilaku dalam berbisnis yang disebut dengan “**BISA**”, yang terdiri dari:

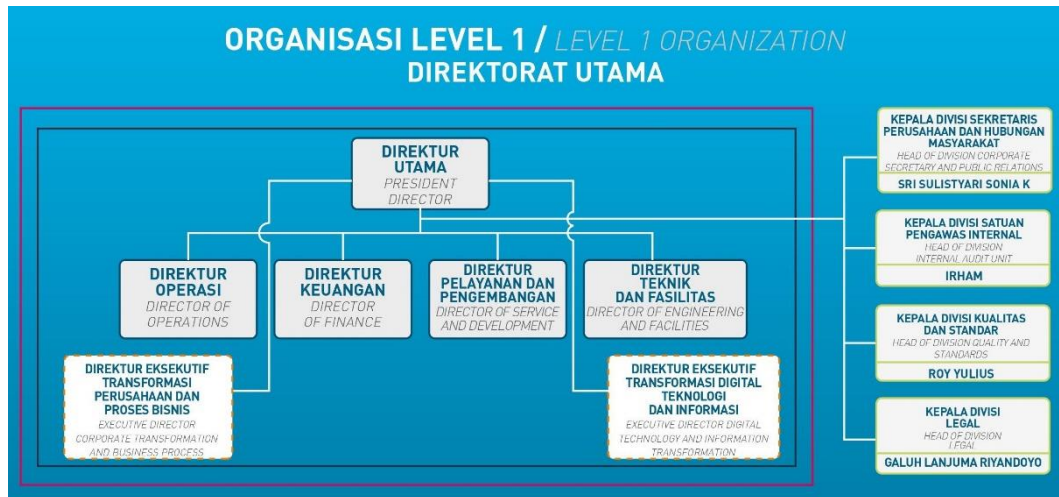
1. **B**ahagia bekerja untuk menciptakan kebahagiaan pelanggan.
2. **I**novatif untuk menciptakan layanan integrasi terbaik.
3. **S**emangat untuk mencapai keunggulan.
4. **A**manah dalam kebersamaan memajukan kota Jakarta.

## 2.2.2 Struktur Organisasi PT. Transportasi Jakarta

Struktur organisasi PT. Transportasi Jakarta dapat dilihat gambar dibawah ini:

**Gambar 2.3**

### Struktur Organisasi PT. Transportasi Jakarta



Sumber: Laporan Tahunan PT. Transjakarta Tahun 2020

Peran, tugas, dan fungsi dari PT. Transjakarta, yaitu pertama, pengoperasian, perawatan, serta pembangunan sistem manajemen pendukung. Kedua, pengelolaan serta pengembangan bisnis atas aset sistem BRT (*Bus Rapid Transit*) yang dirawat serta dioperasikan oleh perusahaan, seperti halte. Ketiga, pengusahaan, pengoperasian, dan perawatan sarana sistem BRT (*Bus Rapid Transit*). Keempat, pengoperasian serta perawatan halte dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB). Kelima, pengelolaan serta pengembangan kepemilikan dan/atau bisnis atas aset perusahaan.

## 2.2.3 Produk dan Layanan Transjakarta

Transjakarta sebagai salah satu penyedia layanan transportasi dengan cakupan pelayanan yang paling luas dan mempunyai peran penting dalam proses

intergasi antarmoda. Per Juni 2021, cakupan populasi terlayani Transjakarta sudah mencapai 82%. Produk dan layanan Transjakarta terdiri dari 13 koridor utama, 164 jumlah rute (rute yang beroperasi), 264 halte, memiliki panjang rute 388 km (dalam koridor utama), dan 3.535 bus. Jenis layanan jasa transportasi Transjakarta meliputi:

1. BRT (*Bus Rapid Transit*), merupakan moda transportasi massal pendukung aktivitas ibukota yang nyaman, aman, cepat, dan tepat waktu dari jadwal, kendaraan, dan infrastruktur. BRT (*Bus Rapid Transit*) memiliki 256 halte yang tersebar dalam 13 koridor.
2. Angkutan umum integrasi, merupakan layanan bus pengumpan atau *feeder busway* yang tersedia untuk area di dalam wilayah yang tidak terlayani baik oleh BRT (*Bus Rapid Transit*) dan menjadi penghubung antara area hunian masyarakat. Layanan ini juga terhubung dengan moda transportasi lain, seperti MRT, LRT, dan Kereta CommuterLine Indonesia.
3. Mikrotrans atau bus kecil, merupakan layanan yang menjangkau 500 meter lokasi keperluan masyarakat, seperti sekolah, puskesmas, dan pasar.
4. Rusun, merupakan layanan yang disediakan untuk memudahkan mobilitas masyarakat rumah susun di DKI Jakarta untuk menuju ke pusat kota.
5. Transjabodetabek, merupakan layanan yang menggunakan bus pendukung untuk melayani wilayah perbatasan, seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok yang diintegrasikan kedalam sistem BRT (*Bus Rapid Transit*) Transjakarta.

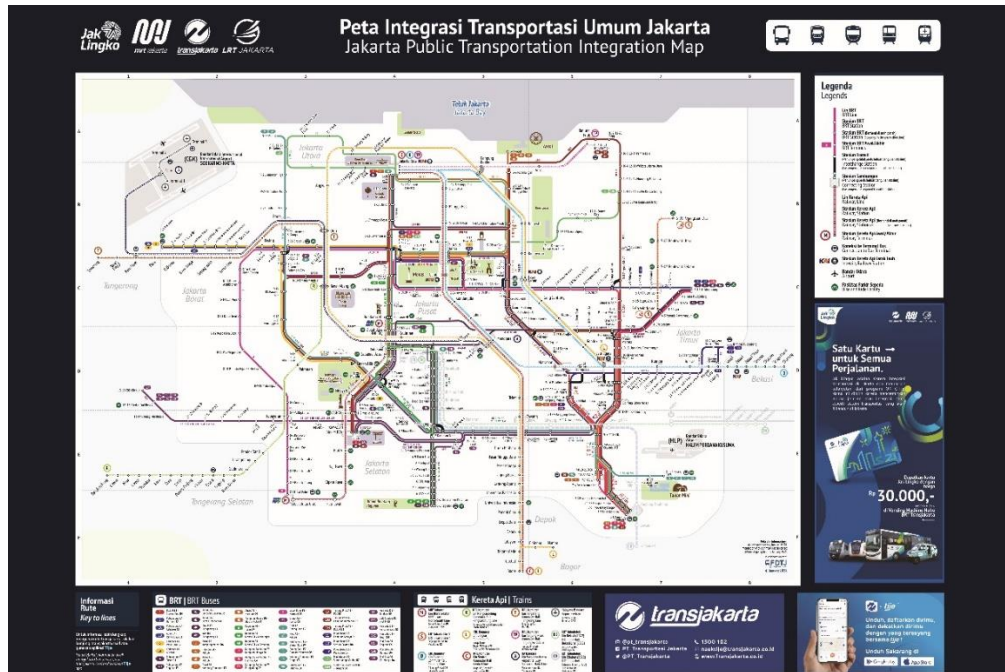
6. Bus wisata atau disebut dengan bus Jakarta *Explorer*, merupakan layanan yang gratis digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Pengoperasian bus ini, yakni menelusuri ikon serta *landmark* yang ada di DKI Jakarta.
7. Penugasan, merupakan layanan angkutan darat, angkutan umum yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik berbayar ataupun tidak berbayar dan dioperasikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
8. Transjakarta *Cares*, merupakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas dengan syarat pemegang KTP DKI Jakarta yang diberikan secara gratis.
9. Royaltrans, merupakan layanan bus premium khusus untuk menjemput dan mengumpan masyarakat di wilayah pinggir kota untuk menuju pusat kota dengan rute khusus masuk jalan bebas hambatan. Bus berwarna ungu ini juga dilengkapi *Wi-Fi* dan pengisi daya untuk telepon pintar.

Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi sejalan dengan tren dari sistem transportasi masa depan yang sudah diterapkan di beberapa negara maju. Harapannya, Indonesia juga dapat menerapkan sistem transportasi yang terpadu dan saling terintegrasi. Berikut peta integrasi antara rute Transjakarta dengan transportasi-transportasi umum yang ada di DKI Jakarta:



**Gambar 2.4**

Peta Integrasi Transjakarta dengan Transportasi Umum di DKI Jakarta



Sumber: Laporan Tahunan PT. Transjakarta Tahun 2020

Berdasarkan gambar 2.4 tentang peta integrasi Transjakarta dengan transportasi umum di DKI Jakarta, dapat dilihat bahwa layanan Transjakarta juga terintegrasi dengan transportasi-transportasi lain yang ada di DKI Jakarta, seperti MRT, LRT, dan Kereta CommuterLine Indonesia. Hal ini diharapkan mampu mengubah pola penggunaan transportasi publik masyarakat DKI Jakarta. Masa depan transportasi publik yang baik dan menempatkan konsumen sebagai pusat dari layanan transportasi, serta bisa memberikan peluang dan manfaat ekonomi yang besar untuk masyarakat.

Transjakarta berupaya memberikan layanan yang terbaik dan berkualitas dimasa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, salah satunya dengan

menambah serta mengurangi armada bus dan rute layanan. Berikut jumlah rute layanan dan armada bus Transjakarta dari tahun 2018 sampai tahun 2020:

**Tabel 2.4**

Jumlah Rute Layanan dan Armada Bus Transjakarta Tahun 2018-2020

<u>Layanan</u>	2018		2019		2020	
	<u>Unit Bus</u>	<u>Rute</u>	<u>Unit Bus</u>	<u>Rute</u>	<u>Unit Bus</u>	<u>Rute</u>
BRT ( <i>Bus Rapid Transit</i> )	750	43	870	53	654	23
<u>Angkutan umum integrasi</u>	480	44	612	70	347	38
<u>Mikrotrans</u>	530	22	1.568	69	1.730	71
<u>Rusun</u>	45	21	46	21	6	5
<u>Transjabodetabek</u>	132	14	195	14	17	2
<u>Bus Wisata</u>	21	7	20	7	0	0
<u>Transjakarta Cares</u>	20	-	22	-	8	-
<u>Penugasan lain</u>	6	-	10	-	18	7
<u>Royaltrans</u>	19	5	92	13	9	4
<b>Total</b>	<b>2.003</b>	<b>156</b>	<b>3.435</b>	<b>247</b>	<b>2.789</b>	<b>150</b>

*Sumber: Laporan Tahunan PT. Transjakarta*

Berdasarkan tabel 2.4 tentang jumlah rute layanan dan armada bus Transjakarta pada tahun 2018-2020 dapat dijelaskan bahwa di tahun 2018 sampai 2019 terjadi peningkatan baik pada jumlah unit armada bus maupun jumlah pada rute layanan. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah unit armada bus dan rute layanan, yaitu berkurang sejumlah 646 unit armada bus dan 97 rute layanan. Layanan bus wisata di tahun 2020 tidak beroperasi sejak Maret sampai dengan Desember 2020, hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Masa pandemi yang dimulai sejak bulan Maret 2020 mentidakibatkan adanya kebijakan dari Pemerintah DKI Jakarta, yaitu dimulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terkait hal tersebut, PT. Transportasi Jakarta melakukan

perubahan pola operasi layanan dengan tetap mempertimbangkan optimalisasi operasional dan juga kebutuhan serta keinginan pengguna. Rata-rata jumlah bus Transjakarta yang beroperasi di akhir tahun 2020 sebanyak 2.789 unit yang dimana menurun 19% dibandingkan rata-rata jumlah bus Transjakarta yang beroperasi di akhir tahun 2019, yaitu sebanyak 3.435 unit.

Jangkauan layanan Transjakarta hingga akhir tahun 2020 mencapai seluas 504,3 km<sup>2</sup> atau sekitar 76,1% dari luas wilayah DKI Jakarta dan melayani sebesar 82,4% dari total populasi penduduk DKI Jakarta. Dalam mencapai keterjangkauan tersebut, di tahun 2020 PT. Transportasi Jakarta memperkuat layanan angkutan bus kecil berupa Mikrotrans dan Angkutan Umum Integrasi. Hal tersebut memberikan dampak yang positif kepada pengguna karena dapat mengurangi kepadatan pengguna di halte-halte transit, serta meningkatkan kenyamanan pengguna karena tidak perlu berpindah rute.